



**Dukung Penguatan Tata Kelola Pertahanan dan Kebijakan Luar Negeri, ISI:
Indo-Pacific Harus Menjadi Prioritas**

Jakarta, 8 Maret 2024 – Pertahanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi di kawasan Indo-Pasifik. Kompetisi negara besar, sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, dan perkembangan teknologi militer di negara-negara di Indo-Pasifik menjadi tantangan strategis utama di kawasan ini. Indonesia merupakan penjaga akses ke Samudera Pasifik dan Hindia, yang memiliki tiga jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI) yang melintang di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Seiring dengan peningkatan aktivitas militer laut dan udara di kawasan dan eskalasi konflik di negara-negara mitra kerja sama Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan ikut terdampak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi segala potensi tantangan dan ancaman yang dapat menyebabkan instabilitas bagi Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara yang merupakan konsentrik kebijakan luar negeri utama.

Pemerintah Indonesia perlu menyinergikan kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negerinya, agar mampu memberikan respons tepat terhadap perkembangan situasi di kawasan. Selain itu, riset dan pengembangan (*research and development* atau R&D), transformasi pertahanan, dan penguatan SDM menjadi faktor esensial untuk meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi militer di tingkat global. Pemerintah Indonesia juga memerlukan dukungan dari komunitas epistemik untuk mendapatkan analisis yang akurat dan komprehensif terhadap kondisi kawasan Indo-Pasifik yang terus berubah. **Akan tetapi, jumlah *think tank* berkualitas di Indonesia masih sedikit apabila dibandingkan dengan negara kekuatan menengah lainnya, khususnya yang berfokus pada isu kebijakan luar negeri dan pertahanan.** Indonesia tercatat memiliki 37 *think tank* (jauh di bawah Vietnam dengan 180 *think tank*), dan di antaranya, hanya satu yang diakui dalam daftar 100 *think tank* terbaik dunia (CSIS) (Data Universitas Pennsylvania tahun 2020).

Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), yang bernaung di bawah Yayasan Rupa Madani Nusantara (Rupantara), didirikan sebagai wadah pemikir-pemikir di bidang pertahanan internasional untuk memberi masukan kebijakan yang tepat guna bagi pemerintah Indonesia. ISI berkonsentrasi pada lima fokus kajian yakni kebijakan luar negeri dan diplomasi, kebijakan pertahanan dan kajian strategik, peperangan modern dan teknologi militer, ekonomi pertahanan, serta kontra-terorisme dan kontra-insurgensi.

Peluncuran ISI dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024 di Perpustakaan Nasional RI. Pada kesempatan tersebut, **Dr. Muhammad Hadianto, Pendiri dan Penasihat Utama ISI**, menjelaskan bahwa, “ISI diharapkan dapat menjadi *leading sector* dalam kajian yang menyangkut isu-isu keamanan dan geostrategi di Indo-Pasifik. Kami meyakini Indonesia akan menjadi kekuatan yang disegani di tengah perubahan dinamika keamanan global. ISI memiliki misi untuk memperkuat diskursus publik terkait geostrategi dan geopolitik di Indonesia melalui kolaborasi sipil dan militer.”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pun memberikan sambutan untuk peluncuran ISI. Beliau mengatakan, “Sinergitas antara pemerintah dan ISI dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik maupun di level global. Saat ini Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang diterima untuk ‘*open for accession discussion*’ dengan OECD. Untuk itu, kolaborasi yang erat dengan *think tank* seperti ISI sebagai *knowledge partner* diharapkan bisa berdampak positif pada upaya peningkatan kualitas kebijakan Indonesia.”

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan apresiasi kepada ISI. Beliau berharap bahwa ISI dapat menjadi kawah candradimuka para ahli sipil untuk kajian pertahanan dan kebijakan luar negeri sehingga Indonesia dapat memastikan keberlangsungan transformasi pertahanan. Beliau juga mendukung ISI untuk mewadahi kolaborasi sipil-militer, karena belum banyak yang mengkaji kaitan dinamika Indo-Pasifik dan ekosistem industri pertahanan.

Terakhir, Kementerian Pertahanan menyambut baik kehadiran ISI dan menyatakan siap menerima saran kebijakan, khususnya untuk kepentingan nasional Indonesia yang bersentuhan dengan isu geostrategis di Indo-Pasifik. ISI juga diharapkan dapat berkontribusi untuk melahirkan kebijakan berkualitas pada isu-isu prioritas, seperti penguatan tata kelola akuisisi teknologi pertahanan dan kemandirian pertahanan yang selektif.



YAYASAN RUPA MADANI NUSANTARA (RUPANTARA)



ISI berkeyakinan bahwa Indo-Pasifik yang aman dan stabil tidak bisa dipisahkan dari keamanan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Akan tetapi Indonesia belum memiliki kebijakan integratif dalam merespons dinamika di kawasan. ISI merekomendasikan tiga hal kepada pemerintah Indonesia untuk menghindari kelumpuhan strategis. Pertama, pembentukan fungsi dewan pertahanan dan keamanan nasional di bawah Presiden untuk menyusun kalkulasi strategis dari berbagai opsi kebijakan yang akan dipilih untuk merespons ancaman spesifik. Kedua, mempromosikan penguatan komunitas epistemik yang mendukung kolaborasi sipil-militer dalam kerangka demokratis. Ketiga, mengadopsi pendekatan transformatif untuk kebijakan luar negeri dan modernisasi pertahanan.

Acara peluncuran ini menegaskan bahwa ISI tidak hanya berperan sebagai pusat kajian, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. ISI juga berkomitmen untuk terus membangun dan memelihara sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang pemerintahan, akademik, dan swasta, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. ISI juga akan mendukung dialog antar kekuatan-kekuatan demokratis di Indo-Pasifik untuk memelihara perdamaian dan menyepakati resolusi damai yang konstruktif terhadap penyelesaian masalah. Dengan begitu, kehadiran ISI dapat dilihat sebagai sebuah langkah konkret mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan kebijakan pertahanan yang berorientasi pada keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

###

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Mei Rinta

Tlp: +62 821-4000-2549

Tentang ISI:

ISI didirikan pada Oktober 2023, di bawah naungan Yayasan Rupa Madani Nusantara (Rupantara). ISI berdiri sebagai lembaga independen, lembaga pemikir non-partisan berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghasilkan keputusan yang terinformasi dengan baik. Ini berfokus pada menjembatani kesenjangan antara dinamika regional dan global, menyelaraskan kesiapan pertahanan negara, menyelaraskan kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia secara konsentris, dan mempromosikan tata kelola yang baik.



YAYASAN RUPA MADANI NUSANTARA (RUPANTARA)

